

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
SEKRETARIAT JENDERAL
692004



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.01.2.692004/2025**



DS:0665-0089-6048-2905

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 2. Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode/Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 63.116.389.000 (ENAM PULUH TIGA MILIAR SERATUS ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	Rp. 63.116.389.000
135.01.WA.	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp. 63.116.389.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	63.116.389.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 63.116.389.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.01.WA	Program Dukungan Manajemen			63.116.389.000
Kegiatan	:	7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum			63.116.389.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	8,00	Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit	29.687.731.000
Rincian Output	:	01 EBA.001	Pengelolaan BMN Kantor Wilayah	2.00	Laporan	45.785.000
		02 EBA.002	Layanan Kerja Sama	1.00	Laporan	87.460.000
		03 EBA.956	Layanan BMN	1.00	Layanan	10.000.000
		04 EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.00	Layanan	456.320.000
		05 EBA.959	Layanan Protokoler	1.00	Layanan	46.800.000
		06 EBA.962	Layanan Umum	1.00	Layanan	119.131.000
		07 EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00	Layanan	28.922.235.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	271,00	Unit, m2, Paket	32.280.707.000
Rincian Output	:	01 EBB.951	Layanan Sarana Internal	269.00	Unit	4.228.419.000
		02 EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2.00	Unit	28.052.288.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	147,00	Orang, Layanan, Rekomendasi	361.286.000
Rincian Output	:	01 EBC.001	Layanan Manajemen SDM Internal	1.00	Layanan	50.600.000
		02 EBC.954	Layanan Manajemen SDM	146.00	Orang	310.686.000
Klasifikasi Rincian Output 4	:	7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	15,00	Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi	786.665.000
Rincian Output	:	01 EBD.001	Pengelolaan Perencanaan dan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	2.00	Laporan	140.361.000
		02 EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Kantor Wilayah	3.00	Dokumen	80.040.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 2

Layanan Manajemen Kinerja Internal			Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi		
03	EBD.003	Koordinasi dan konsultasi Manajemen Keuangan	2.00	Laporan	205.114.000
04	EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3.00	Laporan	67.050.000
05	EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.00	Dokumen	19.000.000
06	EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	3.00	Laporan	207.500.000
07	EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1.00	Laporan	67.600.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
I B. SUMBER DANA**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	63.116.389.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	Pagu	0	Rp.	Ekuivalen Rupiah	0
1. Rupiah Murni	Rp.	63.116.389.000		(2) RPLN	US\$		0	Rp.		0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$		0	Rp.		0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$		0	Rp.		0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR		0			
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR		0			
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR		0			
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR		0			

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	21.319.034	9.516.648	32.280.707	-	-	63.116.389		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen	21.319.034	9.516.648	32.280.707	-	-	63.116.389		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	21.319.034	9.516.648	32.280.707	-	-	63.116.389		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	21.319.034	8.368.697	-	-	-	29.687.731	01 . 55	
01	RM	21.319.034	8.368.697	-	-	-	29.687.731	139@	
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	-	32.280.707	-	-	32.280.707	01 . 55	
01	RM	-	-	32.280.707	-	-	32.280.707	139	
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	361.286	-	-	-	361.286	01 . 55	
01	RM	-	361.286	-	-	-	361.286	139@	
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	786.665	-	-	-	786.665	01 . 55	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	RM	-	786.665	-	-	-	786.665	139@	
JUMLAH		21.319.034	9.516.648	32.280.707	-	-	63.116.389		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (01) SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692004) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

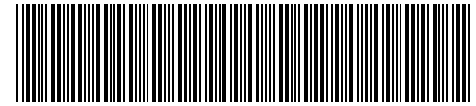
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	3.843.000	2.377.570	6.402.445	3.604.347	2.456.628	7.831.043	8.931.767	7.651.699	2.386.888	7.448.206	7.954.482	2.228.316	63.116.389
		BELANJA PEGAWAI	1.565.156	1.565.156	2.833.709	1.565.156	1.565.156	1.565.156	2.833.727	1.565.156	1.565.156	1.565.156	1.565.156	1.565.194	21.319.034
		BELANJA BARANG	651.574	792.414	836.587	649.191	821.472	984.496	816.649	845.152	781.732	849.159	847.935	640.289	9.516.648
		BELANJA MODAL	1.626.270	20.000	2.732.149	1.390.000	70.000	5.281.391	5.281.391	5.241.391	40.000	5.033.891	5.541.391	22.833	32.280.707
	135.01.WA.7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	3.843.000	2.377.570	6.402.445	3.604.347	2.456.628	7.831.043	8.931.767	7.651.699	2.386.888	7.448.206	7.954.482	2.228.316	63.116.389
		51 BELANJA PEGAWAI	1.565.156	1.565.156	2.833.709	1.565.156	1.565.156	1.565.156	2.833.727	1.565.156	1.565.156	1.565.156	1.565.156	1.565.194	21.319.034
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	651.574	792.414	836.587	649.191	821.472	984.496	816.649	845.152	781.732	849.159	847.935	640.289	9.516.648
		53 BELANJA MODAL	1.626.270	20.000	2.732.149	1.390.000	70.000	5.281.391	5.281.391	5.241.391	40.000	5.033.891	5.541.391	22.833	32.280.707

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
IV A. B L O K I R**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692004] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 349.354		
	52 Belanja Barang Rp. 349.354		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 92.613		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.600
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.040		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.463		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.600		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7099.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.038		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.01.2.692004/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:0665-0089-6048-2905

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [01] SEKRETARIAT JENDERAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692004] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692004	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		
135.01.WA	Program Dukungan Manajemen		
7099	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum		
7099.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		
		Rp.	29.658.558
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		
	* Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Eselon II : 1 Unit, Kendaraan Listrik Berbasis Baterai Operasional : 2 Unit	Rp.	1.606.270
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		
	* Renovasi Rumah Susun Tower 1 1305 m2, Renovasi Rumah Susun Tower 2 2220 m2	Rp.	28.052.288

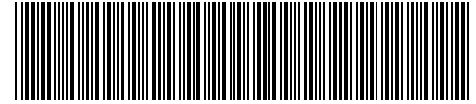
Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum

ttd.
NICO AFINTA

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
692044



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.04.2.692044/2025**



DS:3299-0122-7907-8882

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (692044) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 2.556.450.000 (DUA MILIAR LIMA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.556.450.000
135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp. 2.556.450.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	2.556.450.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 2.556.450.000

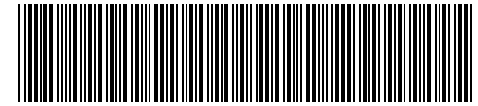
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692044) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.556.450.000
Kegiatan	:	7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah			2.556.450.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan			
		2. 01	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah			
		3. 01	Persentase Permohonan Layanan BHP yang diselesaikan			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	5,00	layanan	1.419.197.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4,00	layanan	1.380.557.000
		02 BAH.003	Pemantauan dan Evaluasi Layanan AHU di Wilayah	1,00	layanan	38.640.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga	1,00	Perkara	5.080.000
Rincian Output	:	01 BCB.001	Penanganan Perkara terkait Produk Layanan AHU di Wilayah	1,00	Perkara	5.080.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	7,00	Lembaga	1.132.173.000
Rincian Output	:	01 BIC.001	Pengawasan Kenotariatan oleh Majelis Pengawas di Wilayah	7,00	Lembaga	1.132.173.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

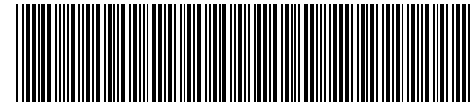
ttd.
WIDODO

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025

I B. SUMBER DANA



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (692044) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.556.450.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	2.556.450.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692044) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

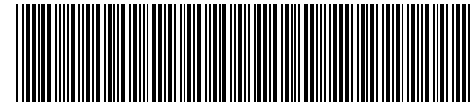
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692044	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	2.556.450	-	-	-	2.556.450		
135.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.556.450	-	-	-	2.556.450		
7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	-	2.556.450	-	-	-	2.556.450		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	1.419.197	-	-	-	1.419.197	01 . 55	
04	PNBP	-	1.419.197	-	-	-	1.419.197	139@	
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	5.080	-	-	-	5.080	01 . 55	
04	PNBP	-	5.080	-	-	-	5.080	139@	
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	1.132.173	-	-	-	1.132.173	01 . 55	
04	PNBP	-	1.132.173	-	-	-	1.132.173	139@	
JUMLAH		-	2.556.450	-	-	-	2.556.450		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692044) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

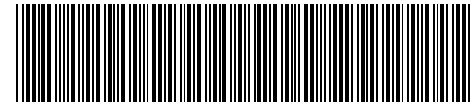
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692044	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	391.110	233.006	245.230	183.380	294.067	365.780	229.700	125.536	126.200	130.834	231.607	2.556.450
		BELANJA BARANG	0	391.110	233.006	245.230	183.380	294.067	365.780	229.700	125.536	126.200	130.834	231.607	2.556.450
	135.04.BF.7110	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	0	391.110	233.006	245.230	183.380	294.067	365.780	229.700	125.536	126.200	130.834	231.607	2.556.450
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	391.110	233.006	245.230	183.380	294.067	365.780	229.700	125.536	126.200	130.834	231.607	2.556.450

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025
IV A. B L O K I R**



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692044] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692044	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 344.913		
	52 Belanja Barang Rp. 344.913		
135.04.BF 7110	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		
7110.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.570 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.135 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.695 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 147.848 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BCB	Perkara Hukum Lembaga		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.040 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7110.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 112.625 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.04.2.692044/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:3299-0122-7907-8882

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692044] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

ttd.
WIDODO

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
PEMASYARAKATAN
692499

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA-137.04.2.692499/2025**

A. Dasar Hukum :

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran :

1. Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
 2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (692499) KANWIL DJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA
- Sebesar :Rp. 704.610.000,00 (Tujuh Ratus Empat Juta Enam Ratus Sepuluh Ribu RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.05 LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

	Jumlah Uang
137.04.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 704.610.000,00
137.04.BF.6170 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 704.610.000,00

C. Sumber Dana Berasal Dari:

1. Rupiah Murni	Rp. 704.610.000,00	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp. 0,00
2. PNBP		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp. 0,00
PNBP TA Berjalan	Rp. 0,00	- Hibah Dalam Negeri	Rp. 0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp. 0,00	5. Hibah Langsung	Rp. 0,00
- Pinjaman Luar Negeri	Rp. 0,00	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp. 0,00
- Hibah Luar Negeri	Rp. 0,00	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp. 0,00
		6. SBSN PBS	Rp. 0,00

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN Jakarta V (139) Rp. 704.610.000,00

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.04.2.692499/2025
I A. INFORMASI KINERJA

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (692499) KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA

Halaman IA.1

Jakarta, 2 Desember 2024
Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.04.2.692499/2025
I B. SUMBER DANA**

Kementerian Negara/Lembaga: (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692499) KANWIL DJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA

Halaman IB.1

						Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	704.610.000,00	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
1. Rupiah Murni	Rp.	704.610.000,00			(2) RPLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
2. PNBP	Rp.	0,00		b. Hibah Luar Negeri	(1) Valuta Asing	US\$	0,00	Rp.	0,00
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0,00			(2) RHLN	US\$	0,00	Rp.	0,00
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0,00		c. Pinjaman Dalam Negeri		IDR	0,00		
5. Hibah Langsung	Rp.	0,00		d. Hibah Dalam Negeri		IDR	0,00		
6. SBSN PBS	Rp.	0,00		e. Hibah Luar Negeri Langsung		IDR	0,00		
				f. Hibah Dalam Negeri Langsung		IDR	0,00		

2. Rincian Pinjaman/Hibah :

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp. LN	Rp. Loc. Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.04.2.692499/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**

Kementerian Negara / Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : (692499) KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA
Kewenangan : (KD) KANTOR DAERAH

Halaman II.1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/AKTIVITAS/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
692499	KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA	-	704.610,00	-	-	-	704.610,00		
137.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	704.610,00	-	-	-	704.610,00		
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	-	704.610,00	-	-	-	704.610,00		
6170.AEA	Koordinasi (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	110.748,00	-	-	-	110.748,00	01.55	
01	RM	-	110.748,00	-	-	-	110.748,00	139@	RM
6170.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	275.825,00	-	-	-	275.825,00	01.55	
01	RM	-	275.825,00	-	-	-	275.825,00	139@	RM
6170.BHB	Operasi Bidang Keamanan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	236.437,00	-	-	-	236.437,00	01.55	
01	RM	-	236.437,00	-	-	-	236.437,00	139@	RM
6170.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	81.600,00	-	-	-	81.600,00	01.55	
01	RM	-	81.600,00	-	-	-	81.600,00	139@	RM
	JUMLAH	-	704.610,00	-	-	-	704.610,00		

Jakarta, 2 Desember 2024
Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.04.2.692499/2025
IV A. B L O K I R**

Kementerian Negara / Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [692499] KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692499	KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 44.805,00
	<i>Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 209.977,00</i>		Catatan
	52 BELANJA BARANG DAN Rp. 209.977,00		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 22.403,00</i>
137.04.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
6170	Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
6170.AEA	Koordinasi		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 69.550,00
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 5.148,00		Catatan
	Catatan		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 34.775,00</i>
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 2.574,00</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>	6170.BHB	Operasi Bidang Keamanan
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 17.000,00		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 65.860,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 8.500,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 32.930,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM) 69.550,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 54.000,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 34.775,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 27.000,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>
6170.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6170.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa (RM) 12.440,00		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (RM) 81.600,00
	Catatan		Catatan
	<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 6.220,00</i>		<i>Tidak dapat dicairkan Rp. 40.800,00</i>
	<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>		<i>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</i>
	<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>		<i>Disposisi: Alokasi Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</i>

Jakarta, 2 Desember 2024

Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

ttd.

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA-137.04.2.692499/2025
IV B. C A T A T A N

Kementerian Negara / Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode / Nama Satker : [692499] KANWIL DITJEN PEMASYARAKATAN DKI JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

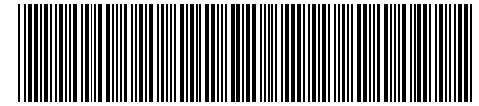
Jakarta, 2 Desember 2024
Plt. Direktur Jenderal Pemasyarakatan

Y. Ambeg Paramarta
NIP. 196503221987031002

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
IMIGRASI
692871



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 137.03.2.692871/2025**



DS:8962-9400-3781-0628

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (692871) KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA
- Sebesar : Rp. 1.919.184.000 (SATU MILIAR SEMBILAN RATUS SEMBILAN BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.90 KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

					Jumlah Uang
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			Rp.	1.919.184.000
137.03.BF.6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			Rp.	1.919.184.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	0	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	1.919.184.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 1.919.184.000

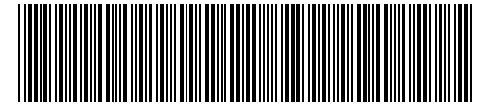
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:8962-9400-3781-0628

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692871) KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			1.919.184.000
Kegiatan	:	6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah			1.919.184.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan terhadap total permohonan layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diterima			
		2. 01	Persentase penegakan Hukum Pro Yustisia di kewilayahan yang ditangani			
		3. 02	Persentase Tindakan Administratif Keimigrasian di kewilayahan yang ditangani			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6161.BHB	Operasi Bidang Keamanan	19,00	operasi, Hari Operasi	489.116.000
Rincian Output	:	01	BHB.U01 Operasi Intelijen Keimigrasian di Wilayah	12,00	operasi	236.124.000
		02	BHB.U02 Operasi Mandiri di Wilayah	5,00	operasi	131.785.000
		03	BHB.U03 Operasi Gabungan di Wilayah	1,00	operasi	62.140.000
		04	BHB.U04 Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah	1,00	operasi	59.067.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	2,00	Orang	1.180.826.000
Rincian Output	:	01	BIB.004 Pembinaan dan Koordinasi Bidang Teknis Keimigrasian	1,00	Orang	944.927.000
		02	BIB.005 Pemantauan dan Evaluasi Bidang Keimigrasian	1,00	Orang	235.899.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6161.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat	16,00	Orang, Kelompok Masyarakat	249.242.000
Rincian Output	:	01	BKA.001 Pengawasan Orang Asing	16,00	Orang	249.242.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

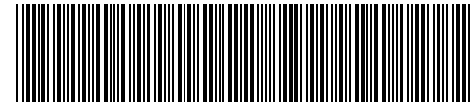
ttd.
Agus Andrianto

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025

I B. SUMBER DANA



DS:8962-9400-3781-0628

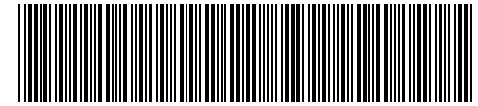
Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
 Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (692871) KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah			
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	1.919.184.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN	US\$ 0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	1.919.184.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:8962-9400-3781-0628

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692871) KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA
Kewenangan : (KD)

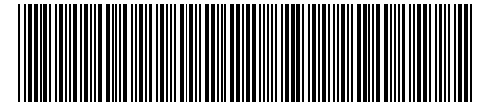
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692871	KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA	-	1.919.184	-	-	-	1.919.184		
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	1.919.184	-	-	-	1.919.184		
6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	-	1.919.184	-	-	-	1.919.184		
6161.BHB	Operasi Bidang Keamanan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	489.116	-	-	-	489.116	01 . 55	
04	PNBP	-	489.116	-	-	-	489.116	139	
6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	1.180.826	-	-	-	1.180.826	01 . 55	
04	PNBP	-	1.180.826	-	-	-	1.180.826	139@	
6161.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	249.242	-	-	-	249.242	01 . 55	
04	PNBP	-	249.242	-	-	-	249.242	139@	
JUMLAH		-	1.919.184	-	-	-	1.919.184		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:8962-9400-3781-0628

Kementerian Negara/Lembaga : (137) KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692871) KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692871	KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	244.173	140.477	146.202	233.239	200.786	205.291	200.352	207.084	140.862	152.108	48.610	1.919.184
		BELANJA BARANG	0	244.173	140.477	146.202	233.239	200.786	205.291	200.352	207.084	140.862	152.108	48.610	1.919.184
137.03.BF.6161		Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	0	244.173	140.477	146.202	233.239	200.786	205.291	200.352	207.084	140.862	152.108	48.610	1.919.184
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	244.173	140.477	146.202	233.239	200.786	205.291	200.352	207.084	140.862	152.108	48.610	1.919.184

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025
IV A. B L O K I R**



DS:8962-9400-3781-0628

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692871] KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA

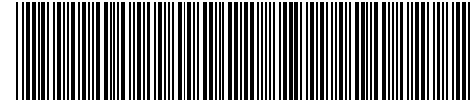
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692871	KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.530
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 519.996		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 519.996		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
137.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
6161	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.440
6161.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 326.627		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.200		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.940		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 62.415		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6161.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.844		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 137.03.2.692871/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:8962-9400-3781-0628

Kementerian Negara/Lembaga : [137] KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692871] KANWIL DITJEN IMIGRASI DKI JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

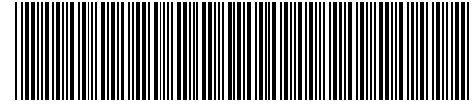
Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

ttd.
Agus Andrianto

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
KEKAYAAN INTELEKTUAL
692991



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.05.2.692991/2025**



DS:9942-5004-9997-9098

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker : (692991) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 2.443.176.000 (DUA MILIAR EMPAT RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

		Jumlah Uang
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 2.443.176.000
135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp. 2.443.176.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 0 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 2.443.176.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 2.443.176.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692991) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			2.443.176.000
Kegiatan	:	7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah			2.443.176.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		2. 01	Persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah			
		3. 02	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	2.640,00	Orang	2.403.594.000
Rincian Output	:	01	BDC.001 Diseminasi dan Edukasi Kekayaan Intelektual di Wilayah	2370.00	Orang	2.271.794.000
		02	BDC.002 Fasilitasi Pendampingan Layanan Kekayaan Intelektual di Wilayah	120.00	Orang	71.800.000
		03	BDC.003 Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual	150.00	Orang	60.000.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7121.BKB	Pemantauan produk	3,00	Produk, Layanan	39.582.000
Rincian Output	:	01	BKB.001 Pemantauan Potensi Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah	3.00	Layanan	39.582.000

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

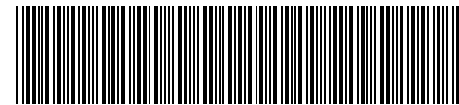
ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (692991) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	2.443.176.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	0		(2) RPLN US\$ 0 Rp.
2. PNPB	Rp.	2.443.176.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing US\$ 0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN US\$ 0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692991) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692991	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	2.443.176	-	-	-	2.443.176		
135.05.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	2.443.176	-	-	-	2.443.176		
7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	-	2.443.176	-	-	-	2.443.176		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	2.403.594	-	-	-	2.403.594	01 . 55	
04	PNBP	-	2.403.594	-	-	-	2.403.594	139@	
7121.BKB	Pemantauan produk (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	39.582	-	-	-	39.582	01 . 55	
04	PNBP	-	39.582	-	-	-	39.582	139@	
JUMLAH		-	2.443.176	-	-	-	2.443.176		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (692991) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

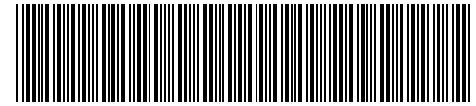
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	692991	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	177.179	328.466	233.359	275.456	226.819	278.536	340.150	329.176	216.118	21.827	16.090	2.443.176
		BELANJA BARANG	0	177.179	328.466	233.359	275.456	226.819	278.536	340.150	329.176	216.118	21.827	16.090	2.443.176
	135.05.BF.7121	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	0	177.179	328.466	233.359	275.456	226.819	278.536	340.150	329.176	216.118	21.827	16.090	2.443.176
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	177.179	328.466	233.359	275.456	226.819	278.536	340.150	329.176	216.118	21.827	16.090	2.443.176

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692991] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
692991	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 782.445		
	52 Belanja Barang Rp. 782.445		
135.05.BF 7121	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah		
7121.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.390		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 48.705		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 709.620		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7121.BKB	Pemantauan produk		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.730		
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.05.2.692991/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9942-5004-9997-9098

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [05] DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [692991] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

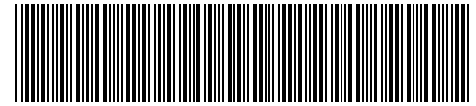
Jakarta, 02 Desember 2024
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

ttd.
RAZILU
NIP. 196511281991031002

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
693024



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.03.2.693024/2025**



DS:1460-8894-0728-6256

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (693024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.03.BB Program Pembentukan Regulasi
135.03.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	400.000.000
135.03.BB.	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp.	400.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 400.000.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| | | | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 400.000.000

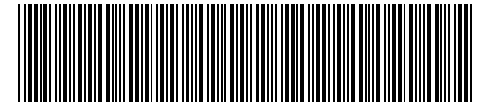
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:1460-8894-0728-6256

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

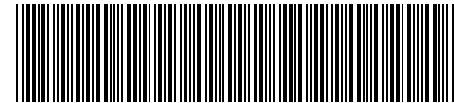
Halaman : I A. 1

Program	:	135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi			400.000.000
Kegiatan	:	7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			400.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	6,00	Rekomendasi Kebijakan	332.140.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah	6,00	Rekomendasi Kebijakan	332.140.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	5,00	Orang	63.550.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	5,00	Orang	63.550.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	4.310.000
Rincian Output	:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Produk Hukum Daerah	1,00	Laporan	4.310.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025**



DS:1460-8894-0728-6256

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I B. 1

		Rp.			Pagu		Ekuivalen Rupiah
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	400.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	400.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:1460-8894-0728-6256

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

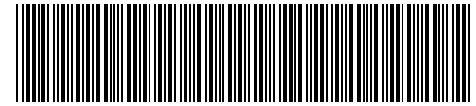
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693024	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	400.000	-	-	-	400.000		
135.03.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	400.000	-	-	-	400.000		
7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	400.000	-	-	-	400.000		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	332.140	-	-	-	332.140	01 . 55	
01	RM	-	332.140	-	-	-	332.140	139@	
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	63.550	-	-	-	63.550	01 . 55	
01	RM	-	63.550	-	-	-	63.550	139@	
7129.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	4.310	-	-	-	4.310	01 . 55	
01	RM	-	4.310	-	-	-	4.310	139	
JUMLAH		-	400.000	-	-	-	400.000		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:1460-8894-0728-6256

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (03) DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693024) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

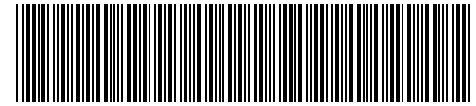
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693024	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.414	400.000
		BELANJA BARANG	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.414	400.000
	135.03.BB.7129	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.414	400.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.326	33.414	400.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025
IV A. B L O K I R**



DS:1460-8894-0728-6256

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693024] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

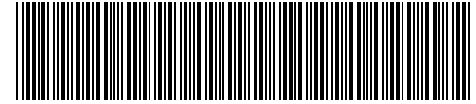
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693024	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 115.970		
	52 Belanja Barang Rp. 115.970		
135.03.BB 7129	Program Pembentukan Regulasi Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah		
7129.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.900 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 94.890 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7129.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.180 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttd.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.03.2.693024/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:1460-8894-0728-6256

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [03] DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693024] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

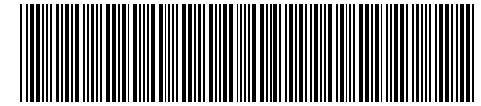
Jakarta, 02 Desember 2024
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan

ttt.
Dr. Dhahana Putra, Bc.IP., S.H., M.Si.
NIP. 196909091993031001

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
HAK ASASI MANUSIA
693058



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 136.04.2.693058/2025**



DS:4205-6053-6889-0187

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
2. Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (693058) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 238.720.000 (DUA RATUS TIGA PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

136.04.BG Program Pemajuan dan Penegakan HAM
136.04.BG. Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 238.720.000
Rp. 238.720.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	238.720.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 238.720.000

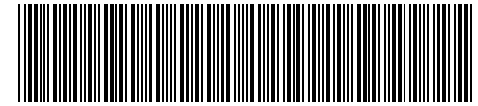
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : (136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693058) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	136.04.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM			238.720.000
Kegiatan	:	6151	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah			238.720.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase Pelaksanaan RANHAM di kewilayahan			
		2. 01	Persentase tanggapan terhadap rekomendasi produk hukum daerah berperspektif HAM yang ditindaklanjuti			
		3. 02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan HAM di Wilayah			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	6151.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan	50.170.000
Rincian Output	:	01 BAH.001	Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1,00	layanan	43.160.000
		02 BAH.002	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Penanganan Dugaan Pelanggaran HAM di Wilayah	1,00	layanan	7.010.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	6151.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	28.775.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM	1,00	Lembaga	28.775.000
Klasifikasi Rincian Output 3	:	6151.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	10,00	Daerah (Prov/Kab/Kota), Provinsi, KabKota	159.775.000
Rincian Output	:	01 FBA.001	Fasilitasi Aksi HAM di Wilayah	3,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	20.325.000
		02 FBA.002	Diseminasi dan Penguatan HAM di Wilayah	3,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	34.825.000
		03 FBA.003	Penilaian Kab/Kota Peduli HAM di Wilayah	3,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	70.945.000
		04 FBA.004	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang Berperspektif HAM di Wilayah	1,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	33.680.000

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

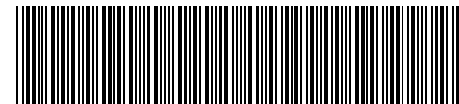
ttd.
NATALIUS PIGAI

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025

I B. SUMBER DANA



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : (136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (693058) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I B. 1

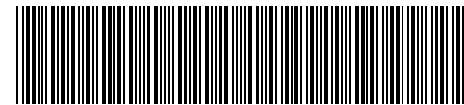
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	238.720.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	238.720.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : (136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
 Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (693058) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA
 Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693058	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	238.720	-	-	-	238.720		
136.04.BG	Program Pemajuan dan Penegakan HAM	-	238.720	-	-	-	238.720		
6151	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	-	238.720	-	-	-	238.720		
6151.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	50.170	-	-	-	50.170	01 . 55	
01	RM	-	50.170	-	-	-	50.170	139@	
6151.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	28.775	-	-	-	28.775	01 . 55	
01	RM	-	28.775	-	-	-	28.775	139@	
6151.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	159.775	-	-	-	159.775	01 . 55	
01	RM	-	159.775	-	-	-	159.775	139@	
JUMLAH		-	238.720	-	-	-	238.720		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

ttd.
NATALIUS PIGAI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : (136) KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693058) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA

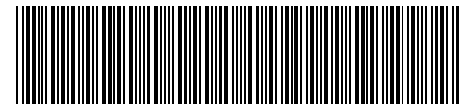
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693058	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	20.611	19.251	23.606	19.251	20.546	19.949	238.720
		BELANJA BARANG	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	20.611	19.251	23.606	19.251	20.546	19.949	238.720
	136.04.BG.6151	Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	20.611	19.251	23.606	19.251	20.546	19.949	238.720
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	19.251	20.611	19.251	23.606	19.251	20.546	19.949	238.720

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

ttd.
NATALIUS PIGAI

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025
IV A. B L O K I R**



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : [136] KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693058] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693058	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA		
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 40.545		
	52 Belanja Barang Rp. 40.545		
136.04.BG 6151	Program Pemajuan dan Penegakan HAM Penyelenggaraan Pemajuan HAM di Wilayah		
6151.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.655 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6151.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.800 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
6151.FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 30.090 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

ttd.
NATALIUS PIGAI

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 136.04.2.693058/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:4205-6053-6889-0187

Kementerian Negara/Lembaga : [136] KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN DAN KEPATUHAN HAK ASASI MANUSIA
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693058] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

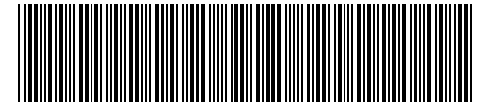
Jakarta, 02 Desember 2024
MENTERI HAK ASASI MANUSIA

ttd.
NATALIUS PIGAI

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
693092



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.11.2.693092/2025**



DS:9010-0137-4348-4499

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 4.720.750.000 (EMPAT MILIAR TUJUH RATUS DUA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	4.720.750.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 4.720.750.000

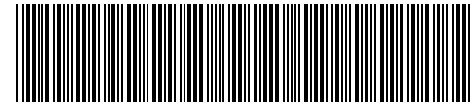
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025

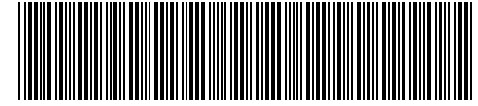


DS:9010-0137-4348-4499

Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

BB	Program Pembentukan Regulasi	Rp.	150.635.000
BB.7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp.	150.635.000
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.	4.570.115.000
BF.7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp.	4.570.115.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi			150.635.000
Kegiatan	:	7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah			150.635.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah analisis dan evaluasi produk hukum yang dilakukan			
		2. 02	Jumlah fasilitasi Perencanaan Perda			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	1,00	Rekomendasi Kebijakan	57.315.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Hasil Analisis dan Evaluasi Hukum di Daerah	1,00	Rekomendasi Kebijakan	57.315.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	1,00	Lembaga	93.320.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Fasilitasi Pembentukan Regulasi Pada Pemerintah Daerah	1,00	Lembaga	93.320.000
Program	:	135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			4.570.115.000
Kegiatan	:	7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah			4.570.115.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase anggota JDIHN yang dikelola terhadap total anggota JDIHN di wilayah			
		2. 01	Persentase layanan bantuan hukum litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum litigasi			
		3. 01	Persentase peningkatan Desa/Kelurahan sadar hukum yang memenuhi kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap total usulan kantor wilayah			
		4. 02	Persentase layanan bantuan hukum non-litigasi yang diberikan terhadap total permohonan layanan bantuan hukum non-litigasi			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	6,00	Lembaga	98.405.000
Rincian Output	:	01 BDB.001	Pengelolaan anggota JDIHN di wilayah	6,00	Lembaga	98.405.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	22,00	Kelompok Masyarakat	223.250.000
Rincian Output	:	01 BDD.001	Layanan penyuluhan hukum di Daerah	2,00	Kelompok Masyarakat	122.350.000
		02 BDD.002	Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum	20,00	Kelompok Masyarakat	100.900.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 2

Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

Kelompok Masyarakat

Klasifikasi Rincian Output	3	:	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	1,00	Orang	20.350.000
Rincian Output		:	01 BIB.001	Penyelenggaraan Paralegal Justice Awards di Wilayah	1,00	Orang	20.350.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	41,00	Lembaga	79.486.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Pembinaan Pelaksanaan Bantuan Hukum di Wilayah	41,00	Lembaga	79.486.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	7136.BMA	Data dan Informasi Publik	1,00	dokumen, Peta, Data	13.020.000
Rincian Output		:	01 BMA.001	Inventarisasi Permasalahan Hukum di Wilayah	1,00	dokumen	13.020.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	1,00	Laporan, Layanan	26.074.000
Rincian Output		:	01 FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	1,00	Laporan	26.074.000
Klasifikasi Rincian Output	7	:	7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	435,00	Orang	3.480.000.000
Rincian Output		:	01 QBA.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi (PN)	435,00	Orang	3.480.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat	59,00	Kelompok Masyarakat	629.530.000
Rincian Output		:	01 QBC.U01	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi (PN)	59,00	Kelompok Masyarakat	629.530.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

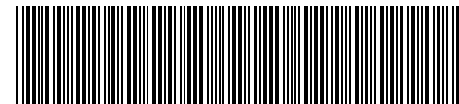
ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025

I B. SUMBER DANA



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I B. 1

		Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	4.720.750.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	4.720.750.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	4.715.750	5.000	-	-	4.720.750		
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	150.635	-	-	-	150.635		
7133	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	-	150.635	-	-	-	150.635		
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	57.315	-	-	-	57.315	01 . 55	
01	RM	-	57.315	-	-	-	57.315	139@	
7133.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	93.320	-	-	-	93.320	01 . 55	
01	RM	-	93.320	-	-	-	93.320	139@	
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	4.565.115	5.000	-	-	4.570.115		
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	-	4.565.115	5.000	-	-	4.570.115		
7136.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	93.405	5.000	-	-	98.405	01 . 55	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	93.405	5.000	-	-	98.405	139@	
7136.BDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	223.250	-	-	-	223.250	01 . 55	
01 RM		-	223.250	-	-	-	223.250	139@	
7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	20.350	-	-	-	20.350	01 . 55	
01 RM		-	20.350	-	-	-	20.350	139@	
7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	79.486	-	-	-	79.486	01 . 55	
01 RM		-	79.486	-	-	-	79.486	139@	
7136.BMA	Data dan Informasi Publik (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	13.020	-	-	-	13.020	01 . 55	
01 RM		-	13.020	-	-	-	13.020	139@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

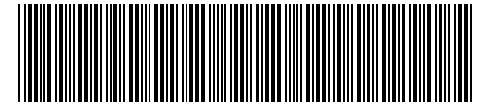
Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	26.074	-	-	-	26.074	01 . 55	
01	RM	-	26.074	-	-	-	26.074	139@	
7136.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	3.480.000	-	-	-	3.480.000	01 . 55	
01	RM	-	3.480.000	-	-	-	3.480.000	139	
7136.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kelompok Masyarakat (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	629.530	-	-	-	629.530	01 . 55	
01	RM	-	629.530	-	-	-	629.530	139	
JUMLAH		-	4.715.750	5.000	-	-	4.720.750		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (11) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693092) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

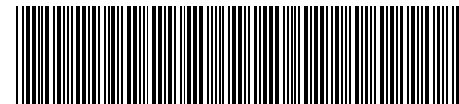
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.480	183.160	658.060	284.760	471.390	526.750	657.775	585.310	619.100	564.031	125.934	35.000	4.720.750
		BELANJA BARANG	9.480	183.160	657.350	284.760	469.970	526.750	657.775	585.310	617.680	564.031	124.485	35.000	4.715.750
		BELANJA MODAL	0	0	710	0	1.420	0	0	0	1.420	0	1.449	0	5.000
135.11.BB.7133		Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	9.480	0	0	7.550	8.230	5.750	92.795	10.430	8.400	8.000	0	0	150.635
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	9.480	0	0	7.550	8.230	5.750	92.795	10.430	8.400	8.000	0	0	150.635
135.11.BF.7136		Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	0	183.160	658.060	277.210	463.160	521.000	564.980	574.880	610.700	556.031	125.934	35.000	4.570.115
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	183.160	657.350	277.210	461.740	521.000	564.980	574.880	609.280	556.031	124.485	35.000	4.565.115
		53 BELANJA MODAL	0	0	710	0	1.420	0	0	0	1.420	0	1.449	0	5.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
IV A. B L O K I R**



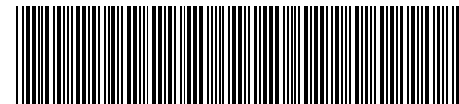
DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693092] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693092	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.230
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 147.733		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	52 Belanja Barang Rp. 147.733		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
135.11.BB	Program Pembentukan Regulasi	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
7133	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 43.180
7133.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.420	7136.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.675
7133.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.720	7136.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 4.150
135.11.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
7136	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7136.BDB	Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	7136.BMA	Data dan Informasi Publik
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.100		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.400
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
7136.BDD	Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	7136.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.552

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
IV A. B L O K I R**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693092] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	<p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p> <p>524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)</p> <p>Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.055</p> <p>Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024</p> <p>Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya</p>		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.11.2.693092/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:9010-0137-4348-4499

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [11] BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693092] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

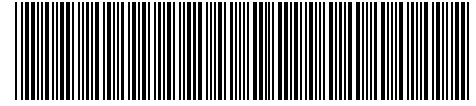
Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

ttd.
MIN USIHEN
NIP. 197105011993031001

KANWIL KEMENKUMHAM DKI JAKARTA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
693126



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 135.12.2.693126/2025**



DS:2199-8135-0084-6699

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
2. Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
4. Kode>Nama Satker : (693126) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
- Sebesar : Rp. 256.544.000 (DUA RATUS LIMA PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

135.12.WA Program Dukungan Manajemen
135.12.WA. Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 256.544.000
Rp. 256.544.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	256.544.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA V (139) Rp. 256.544.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693126) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I A. 1

Program	:	135.12.WA	Program Dukungan Manajemen			256.544.000
Kegiatan	:	7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			256.544.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	4,00	Rekomendasi Kebijakan	215.744.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	4,00	Rekomendasi Kebijakan	215.744.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	102,00	orang	40.800.000
Rincian Output	:	01 AEF.001	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum	102,00	orang	40.800.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

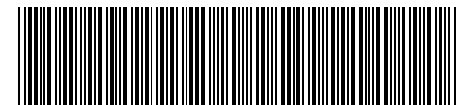
ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025

I B. SUMBER DANA



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
 Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (693126) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : I B. 1

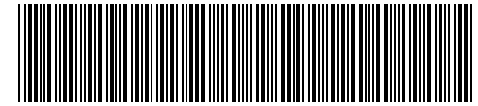
		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	256.544.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	256.544.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693126) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA
Kewenangan : (KD)

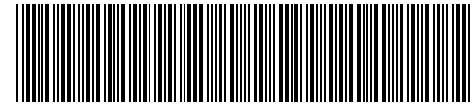
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
693126	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA	-	256.544	-	-	-	256.544		
135.12.WA	Program Dukungan Manajemen	-	256.544	-	-	-	256.544		
7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	256.544	-	-	-	256.544		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	215.744	-	-	-	215.744	01 . 55	
01	RM	-	215.744	-	-	-	215.744	139@	
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi (01.55 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA TIMUR)	-	40.800	-	-	-	40.800	01 . 55	
01	RM	-	40.800	-	-	-	40.800	139@	
JUMLAH		-	256.544	-	-	-	256.544		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : (135) KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : (12) BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (693126) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

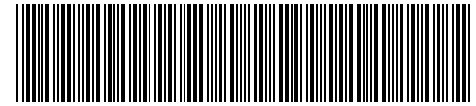
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	693126	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	8.272	23.712	24.167	21.442	62.960	18.058	16.974	23.399	16.413	14.899	13.619	12.629	256.544
		BELANJA BARANG	8.272	23.712	24.167	21.442	62.960	18.058	16.974	23.399	16.413	14.899	13.619	12.629	256.544
	135.12.WA.7143	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	8.272	23.712	24.167	21.442	62.960	18.058	16.974	23.399	16.413	14.899	13.619	12.629	256.544
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	8.272	23.712	24.167	21.442	62.960	18.058	16.974	23.399	16.413	14.899	13.619	12.629	256.544

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025
IV A. B L O K I R**



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693126] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
693126	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 79.435 52 Belanja Barang Rp. 79.435		
135.12.WA 7143	Program Dukungan Manajemen Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah		
7143.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.025 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.360 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
7143.AEF	Sosialisasi dan Diseminasi 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.350 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.700 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 135.12.2.693126/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:2199-8135-0084-6699

Kementerian Negara/Lembaga : [135] KEMENTERIAN HUKUM
Unit Organisasi : [12] BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [693126] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

ttd.
Andry Indrady
NIP. 198002292000021001